

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan Arah Pembangunan Hukum	Jumlah Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum sebagai bahan kebijakan arah pembangunan hukum	5
			Tersusunnya dokumen pembangunan hukum nasional	Belum adanya komitmen K/L untuk memanfaatkan DPHN sebagai bahan perencanaan pembangunan hukum

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN
Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum sebagai bahan kebijakan arah pembangunan hukum		5 Resistensi K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Pusat AE	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	Internal		Tidak tercapainya program penataan Regulasi nasional	Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian	Penyempurnaan Pedoman AE	Resistensi sebagian K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum
	Tersusunnya dokumen pembangunan hukum nasional	Belum adanya komitmen K/L untuk memanfaatkan DPHN sebagai bahan perencanaan pembangunan hukum	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum	Pusat AE	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	Eksternal	UC	Tidak tercapainya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang berkualitas	Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Sebagian Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Resistensi sebagian K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
2	Sebagian Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning

Catatan:

Judgment atas profil risiko berwarna kuning keatas (nilai ≥ 11)

INDIKATOR RISIKO**Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN****Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Resistensi sebagian K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	15	1	5	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	10
2	Sebagian Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam perencanaan pembangunan hukum	15	2	5	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	10

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	10	Mengurangi Risiko	Rakor Rencana Aksi Tindak lanjut Rekomendasi hasil AE	Deklarasi	1	Desember	Pusat AE	-
2	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	10	Mengurangi Risiko	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Buku DPHN	1	Desember	Pusat AE	-

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : PUSAT BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Rakor Rencana Aksi Tindak lanjut Rekomendasi hasil AE	Deklarasi	1	1	100,0	Adanya perbedaan persepsi atas Rekomendasi	10,0	10,0	100,0	0,0	
2	Memperbaiki format dan kualitas DPHN agar dapat di adopsi dalam kerangka regulasi pembangunan hukum	Buku DPHN	1	1	100,0	Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum yang sangat dinamis	10,0	10,0	100,0	0,0	